

LAPORAN

MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA

**BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN
TEROWONGAN KHUSUS**

JANUARI 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2026 dapat disusun dan diterbitkan tepat pada waktunya. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari ini merupakan sarana atau media informasi secara bertahap dalam merencanakan pencapaian kinerja selama periode Tahun 2026 dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari tahun 2026 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi pelaksanaan program bulanan dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025 - 2029 yang setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan serta kegiatan yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2026 Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja keluaran (*output*) dan kinerja hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dan direalisasikan pertahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bulan Januari ini didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP) Terpadu sebagai basis data yang secara sistematis tertanggal 2 Februari 2026.

Dengan disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari tahun 2026 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus secara bertahap (bulanan), dan juga dapat menjadi bahan evaluasi atas pencapaian kinerja serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan saran serta pendampingan selama penyusunan laporan ini, disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya.

Bandung, 03 Februari 2026
Kepala Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus,

Armen Adekristi, S.T., MSCE.
NIP. 198410152008011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas dan Fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus	4
1.3 Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	5
BAB II CAPAIAN KINERJA BULANAN.....	7
2.1 Target Kinerja Bulanan.....	7
2.1.1 Target <i>Output</i> Kegiatan.....	7
2.1.2 Target Pencapaian Indikator Kinerja <i>Output</i> Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	8
2.1.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja <i>Output</i> Layanan Umum	8
2.1.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja <i>Output</i> Layanan Perkantoran	9
2.1.5 Target Indikator Kinerja Kegiatan	9
2.1.6 Target Indikator Kinerja Output.....	10
2.2 Capaian Target Bulanan	11
2.2.1 Pemantauan Progres Data Kinerja.....	11
2.2.2 Capaian Indikator Kinerja <i>Output</i>	11
2.2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan.....	13
2.2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Umum.....	14
2.2.5. Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Perkantoran	15
2.3 Progres Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA. 2025.....	16
BAB III PENUTUP.....	19
3.1 Tindak Lanjut Terhadap Capaian Realisasi Anggaran Bulan Desember 2025.....	19
3.2 Kendala/Permasalahan Bulan Januari 2026	19
3.3 Faktor Pendukung Keberhasilan.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Capaian Output Kegiatan	8
Tabel 2. 2 Target Indikator Kinerja Output Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	8
Tabel 2. 3 Target Capaian Indikator Kinerja Output Layanan Umum.....	9
Tabel 2. 4 Target Capaian Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran	9
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus	9
Tabel 2. 6 Target Indikator Kinerja Output Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	10
Tabel 2. 7 Target Indikator Kinerja Output Layanan Umum.....	10
Tabel 2. 8 Target Indikator Kinerja Output Layanan Perkantoran.....	11
Tabel 2. 9 Tabel Progres Pemantauan Kinerja.....	11
Tabel 2. 10 Target Kriteria Penilaian	12
Tabel 2. 11 Target Output Kegiatan	12
Tabel 2. 12 Pencapaian Indikator Kinerja Output Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan.....	13
Tabel 2. 13 Pencapaian Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Umum	14
Tabel 2. 14 Pencapaian Indikator Kinerja Output Layanan Perkantoran	15
Tabel 3. 1 Tindak Lanjut Kendala di Bulan Sebelumnya.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sturktur Organisasi.....	6
Gambar 2. 1 Progres Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA 2025.....	18

BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi Pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan yang telah direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan internal Pemerintah.

Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi Pemerintah.

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata Pemerintah untuk melaksanakan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*.

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi manajemen kinerja secara taat asas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang meliputi: Renstra, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, LAKIP dan evaluasi LAKIP. Pada tahun 2026 Renstra yang dijadikan acuan adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan tahun 2025 sebagai arah pembangunan bidang jalan dan jembatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bulanan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta atas capaian kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang merupakan salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum. Nomenklatur Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum yang sebelumnya bernama Balai Struktur Jembatan. Selanjutnya, melalui Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2019, dilakukan perubahan terhadap peraturan tersebut, namun tidak terdapat perubahan pada nama maupun struktur organisasi balai. Pada tahun 2020, berdasarkan Permen PUPR Nomor 26 Tahun 2020, nomenklatur balai mengalami perubahan menjadi Balai Jembatan. Pada tahun 2024, melalui Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2024, nama tersebut dikembalikan menjadi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan (BJKT). Namun, pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum nomenklatur balai mengalami perubahan menjadi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

1.2 Tugas dan Fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus didukung oleh unit-unit kerja yang berada dibawahnya sebagaimana tertuang dalam Bagian Kelima Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum.

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan bentang panjang dan terowongan khusus, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 133 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan standar, prosedur, dan kriteria teknis keamanan jembatan dan terowongan khusus;
- c. pelaksanaan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
- d. pelaksanaan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku serta analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
- e. pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
- f. pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- g. pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus; dan
- h. pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangannya, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal balai; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik/kekayaan negara, komunikasi publik dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

1) Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Visi dan Misi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Visi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah:

“BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM MENYELENGGARAKAN PENGATURAN KEAMANAN JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN JALAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA: “MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS JALAN NASIONAL YANG ANDAL DAN PRIMA DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah:

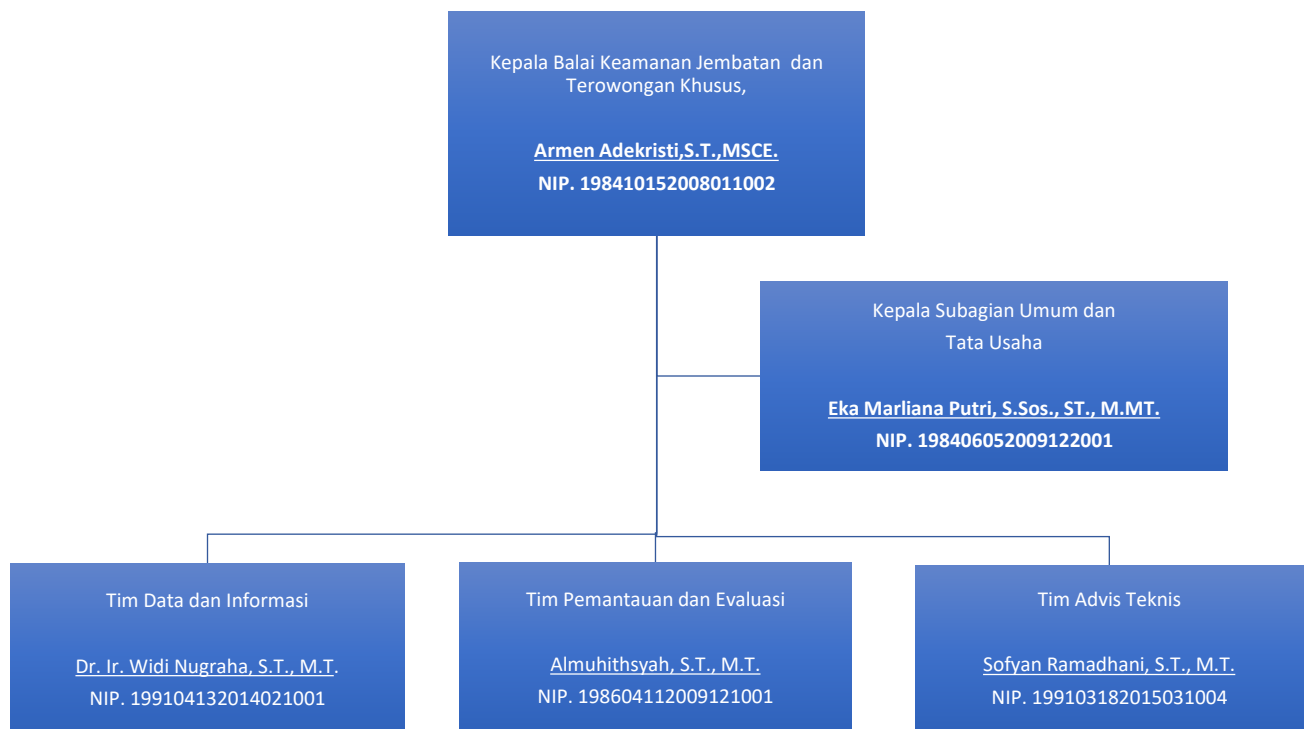
1. Mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan yang meliputi tahap perencanaan teknis, pelaksanaan/konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan untuk memenuhi daya layan dalam pengelolaannya;
2. Meningkatkan Keandalan Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan, sehingga dapat mencegah atau sekurang-kurangnya mengurangi resiko kegagalan bangunan/pekerjaan konstruksi jembatan dan terowongan jalan.

1.3 Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum, struktur organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan unit kerja yang berada dibawahnya terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Sturktur Organisasi

BAB II

CAPAIAN KINERJA BULANAN

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Kerja dan Unit Kerja Eselon II menyusun Penetapan Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh unit Eselon III. Dasar penentuan target kinerja (*target setting*) antara lain:

- a. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki seperti pendanaan yang tersedia, SDM, dan peralatan;
- b. Target kinerja kementerian maupun nasional; dan
- c. Hasil evaluasi terhadap penetapan kinerja periode sebelumnya.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja (dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja) yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

2.1 Target Kinerja Bulan Januari 2026

Pada sub bab ini ditampilkan target Bulan Januari sebagaimana tertuang pada “Rencana Aksi” dan revisinya, yang bersumber dari data pada SiPP Online.

2.1.1 Target *Output* Kegiatan

Output Kegiatan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus terdiri dari 3 *output* kegiatan. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja selama setahun di bagi perbulan. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian. Target pencapaian indikator kinerja tingkat kemantapan jalan nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Target Kinerja Bulan Januari 2026

NO	Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja	Target 2026	Satuan	Rencana Bulan ke 1 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
IKK	Tingkat Kinerja Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100	%	2,12
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan Dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan	2,12
Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis				
IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87,05	%	0,30
1	Layanan Umum	1	Layanan	2,77
2	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0,18

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.2 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja *output* layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan terdiri dari 3 paket kegiatan. Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Unit Kerja selama setahun di bagi perbulan. Target Rencana Aksi Capaian Indikator Kinerja *Output* tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian. Target pencapaian indikator kinerja *output* jumlah layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Output Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

NO	PAKET KEGIATAN	TARGET JANUARI (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan				
1	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Dan Terowongan Jalan	0.78		
2	Advis dan Layanan Teknis Jembatan Dan Terowongan Jalan	1.55		
3	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	2.93		

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum

Indikator kinerja *output* layanan dukungan manajemen satker terdiri dari 2 paket kegiatan. Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Unit Kerja selama setahun di bagi perbulan. Target Rencana Aksi Capaian Indikator Kinerja *Output* tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian. Target pencapaian indikator kinerja *output* layanan dukungan manajemen satker dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3 Target Capaian Indikator Kinerja Output Layanan Umum

NO	PAKET KEGIATAN	TARGET JANUARI (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Layanan Umum				
1	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan	2.77		
2	Pengelolaan Kepegawaian	2.77		
3	Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Resiko Dan Smap	2.77		

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran

Indikator kinerja *Output* layanan perkantoran terdiri dari 5 paket kegiatan. Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Unit Kerja selama setahun di bagi perbulan. Target Rencana Aksi Capaian Indikator Kinerja *Output* tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian. Target pencapaian indikator kinerja *Output* layanan perkantoran dapat dilihat pada **Tabel 2.4**

Tabel 2.4 Target Capaian Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran

NO	PAKET KEGIATAN	TARGET JANUARI (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Layanan Perkantoran				
1	Uang Makan PNS dan PPPK	0.00		
2	Operasional Perkantoran	0.94		
3	Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya	0.02		
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0.37		

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.5 Target Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Rencana Strategis dituangkan dalam target kinerja tahunan agar dapat dieksekusi sampai dengan tingkat *output* dan kinerja *output*-nya. Target kinerja ini disampaikan pada perjanjian kinerja unit eselon II, berikut uraian target indikator kinerja kegiatan dan kinerja *output*.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET (2026)
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan		IKP: Tingkat efektivitas proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	
		Parameter: Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	
		IKK: Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100%
		Output Renstra:	
		Rincian Output:	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET (2026)
	ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		IKP: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)	
		Parameter: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknik Lainnya (DJBM)	
		IKK: Tingkat Kinerja Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87,05%
		Output Renstra:	
		Rincian Output:	
	EBA 962	Layanan Umum	1,00 Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.6 Target Indikator Kinerja Output

Target Indikator Kinerja *Output* Bulan Januari merupakan penjabaran dari indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja TA. 2026. Indikator kinerja *ouput* layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan terdiri dari 3 indikator, indikator kinerja *output* untuk layanan umum terdiri dari 3 indikator, indikator kinerja *output* untuk layanan perkantoran terdiri dari 4 indikator. Target indikator kinerja kegiatan setiap indikator-indikator program Bulan Januari pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dapat dilihat pada **Tabel 2.6 - 2.8**.

Tabel 2. 6 Target Indikator Kinerja Output Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET 2026	
			AWAL	REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Pencapaian Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan				
Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan				
1.	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Dan Terowongan Jalan	Laporan	1,00	
2.	Advis dan Layanan Teknis Jembatan Dan Terowongan Jalan	Laporan	1,00	
3.	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	Laporan	1,00	

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

Tabel 2.7 Target Indikator Kinerja Output Layanan Umum

No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET 2026	
			AWAL	REVISI
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga				
Layanan Umum				
1.	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan	Laporan	1,00	
2.	Pengelolaan Kepegawaian	Laporan	1,00	

No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET 2026	
			AWAL	REVISI
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Layanannya Umum				
3.	Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Risiko, dan SMAP	Laporan	1,00	

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

Tabel 2.8 Target Indikator Kinerja Output Layanan Perkantoran

No	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET 2026	
			AWAL	REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Layanannya Perkantoran				
1.	Uang Makan PNS dan PPPK	Laporan	1,00	
2.	Operasional Perkantoran	Laporan	1,00	
3.	Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya	Laporan	1,00	
4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Laporan	1,00	

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

Target Kinerja Bulan Januari tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian ataupun rencana pencapaian target Bulan Januari baik untuk indikator kinerja program maupun paket kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi.

2.2 Capaian Target Bulanan

2.2.1 Pemantauan Progres Data Kinerja

Pada sub bab ini dilaporkan progres data kinerja yang turut dilaporkan dalam e-Sakip

Tabel 2.9 Tabel Pemantauan Progres Data Kinerja

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2026	RENCANA BULANAN (Rencana Aksi) (%)	RENCANA BULAN JANUARI	REALISASI BULAN JANUARI	KINERJA BULANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)*100
1	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	2.12	2.12	1.14	53.74
1	Tingkat dukungan manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	87.05	0.30	0.30	0.73	246.05

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Output

Untuk memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target bulanan, maka dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tabel 2.10). Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian

diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan/kegagalan indikator kinerja perbulan yang dilaporkan.

Tabel 2.10 Target Kriteria Penilaian

No.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	
2.	A	>80 – 90	Memuaskan	
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik	
4.	B	>60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan	
5.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	
6.	C	>30 – 50	Kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar	

Target yang ditetapkan dalam tabel berikut merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian *output*). Realisasi capaian kinerja *output*, merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja paket kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon III. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut pada bulan selanjutnya. Target pencapaian *ouput* kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 2.11**

Tabel 2.11 Target Output Kegiatan

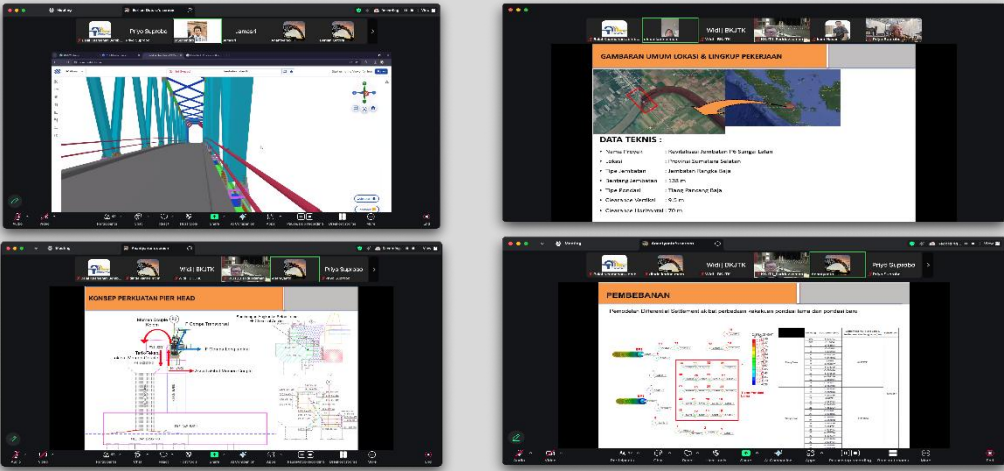
NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET 2026	PAGU (RP. RIBU)	REALISASI (RP. RIBU)	BULAN JANUARI					
						KEUANGAN		FISIK			
						RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	7698.ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1	5.690.182	86.378	2,13	1,52	2,12	1,14	53.74	
2	7756.EBA.962	Layanan Umum	1	123.958	33.150	2,77	26,74	2,77	16,26	246.05	
3	7756.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	2.625.501	0	0,19	0,00	0,18	0,00	0.00	
		Paket Kegiatan Yang Mengalami Kendala/Permasalahan; - Beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Januari namun realisasi pelaporan keuangan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Februari. Rencana Tindak; - Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan. - Merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan proporsinya agar kinerja yang didapat tidak terlalu jauh dari rencana aksi									
		Paket kegiatan yang sudah PHO/Diresmikan; -									

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra Bina Marga 2025-2029, dan SIPP

2.2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

Target yang ditetapkan dalam tabel berikut merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian *output*). Realisasi capaian kinerja *output*, merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja paket kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon III. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut pada bulan selanjutnya. Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada **Tabel 2.12**

Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Output Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU (RP. RIBU)	REALISASI (RP. RIBU)	BULAN JANUARI					
						KEUANGAN		FISIK			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA
	7698.ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan									
1	04.693803 .GA.7698. ABF.001.4 04.AA	Pemantauan Dan Evaluasi Jembatan Dan Terowongan Jalan	1	1.821.054	0	0,78	0,00	0,78	0,00	0.00	
2	04.693803 .GA.7698. ABF.001.4 04.AB	Advis Dan Layanan Teknis Jembatan Dan Terowongan Jalan	1	484.529	14.544	1,55	3,00	1,55	3,00	193.55	
3	04.693803 .GA.7698. ABF.001.4 05.AA	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	1	3.384.599	71.834	2,93	2,12	2,93	1,49	50.85	
		Paket Kegiatan Yang Mengalami Kendala/Permasalahan; - Beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Januari namun realisasi pelaporan keuangan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Februari. - Bobot capaian kinerja lebih dari 100%. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh perencanaan diawal yang kurang matang sehingga realisasinya jauh di atas target/rencana yang telah ditetapkan. Rencana Tindak; - Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan. - Merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan proporsinya agar kinerja yang didapat tidak terlalu jauh dari rencana aksi									
		Paket kegiatan yang sudah PHO/Diresmikan; -									
		Dokumentasi : 									

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra Bina Marga 2025-2029, dan SIPP

2.2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Umum

Target yang ditetapkan dalam tabel berikut merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian *output*). Realisasi capaian kinerja *output*, merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja paket kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon III. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut pada bulan selanjutnya. Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum dapat dilihat pada **Tabel 2.13**

Tabel 2.13 Pencapaian Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Umum

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU (RP. RIBU)	REALISASI (RP. RIBU)	BULAN JANUARI					
						KEUANGAN		FISIK			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA
	7756.EBA.962	Layanan Umum									
1	04.693803.WA.7756.EBA.962.235.AD	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan	1	54.403	33.150	2,77	60,93	2,77	37,04	1137.18	
2	04.693803.WA.7756.EBA.962.235.AE	Pengelolaan Kepegawaian	1	3.811	0	2,77	0,00	2,77	0,00	0.00	
3	04.693803.WA.7756.EBA.962.235.AF	Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Resiko dan SMAP	1	65.744	0	2,77	0,00	2,77	0,00	0.00	
		Paket Kegiatan Yang Mengalami Kendala/Permasalahan; - Beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Januari namun realisasi pelaporan keuangan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Februari. Rencana Tindak; - Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan. - Merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan proporsinya agar kinerja yang didapat tidak terlalu jauh dari rencana aksi									
		Paket kegiatan yang sudah PHO/Diresmikan -									
		Dokumentasi : 									

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.2.5. Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Perkantoran

Target yang ditetapkan dalam tabel berikut merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian *output*). Realisasi capaian kinerja *output*, merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja paket kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon III. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut pada bulan selanjutnya. Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran dapat dilihat pada **Tabel 2.14**

Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja Output Layanan Perkantoran

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU (RP. RIBU)	REALISASI (RP. RIBU)	BULAN JANUARI					
						KEUANGAN		FISIK			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	7756.EBA.994	Layanan Perkantoran									
1	04.693803.WA.7756.EB A.994.001.A G	Uang Makan Dan Lembur PNS Dan PPPK	1	330,060	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	04.693803.WA.7756.EB A.994.002.A H	Operasional Perkantoran	1	269.060	0	0,95	0,00	0,94	0,00	0,00	
3	04.693803.WA.7756.EB A.994.002.A I	Langganan Daya Dan Jasa Operasional Lainnya	1	1.505.939	0	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
4	04.693803.WA.7756.EB A.994.002.A J	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor	1	520.442	0	0,38	0,00	0,37	0,00	00.00	
		Paket Kegiatan Yang Mengalami Kendala/Permasalahan; - Beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Januari namun realisasi pelaporan keuangan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Februari. Rencana Tindak; - Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan									
		Paket kegiatan yang sudah PHO/Diresmikan -									
		Dokumentasi :    									

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

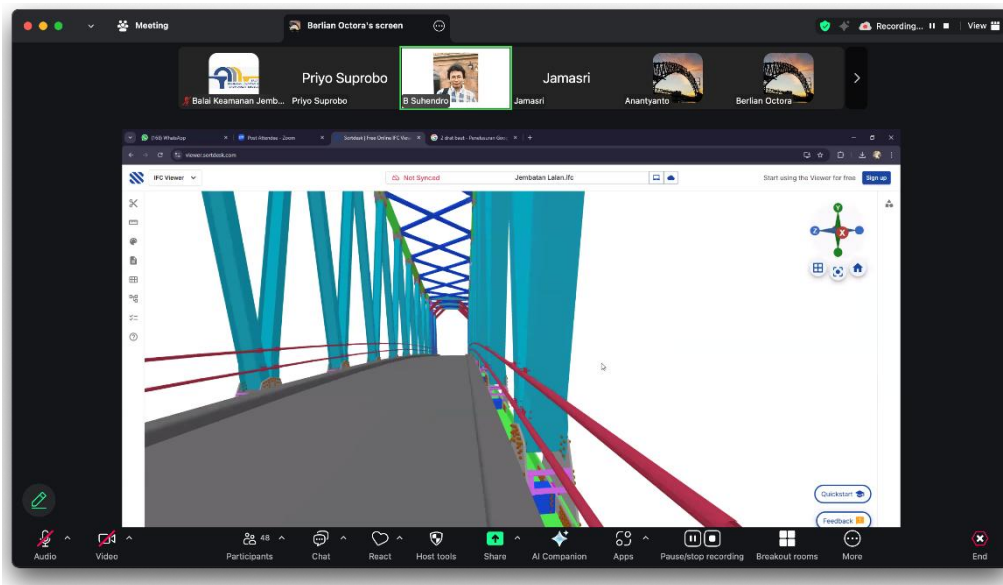
2.3 Uraian Singkat Paket Pekerjaan

Uraian paket pekerjaan mulai dari penjelasan paket, progres/capaian, permasalahan/kendala, rencana tindak lanjut serta foto-foto terbaru, yang meliputi

2.3.1 Paket ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

1. Progress dan Foto/Dokumentasi

Pada bulan Januari 2026 progress yang dicapai Paket ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan adalah 1,14% dari rencana 2,12% (Kinerja 53,74%).



2. Permasalahan

Tidak ada permasalahan pada paket ini karena mendapatkan penilaian kinerja C/Cukup.

3. Rencana Tindak Lanjut

Karena mendapatkan penilaian kinerja C/Cukup sehingga tidak membutuhkan Rencana Tindak Lanjut.

2.3.2 Paket EBA 962 Layanan Umum

1. Progress dan Foto/Dokumentasi

Pada bulan Januari 2026 progress yang dicapai Paket EBA 962 Layanan Umum adalah 16,26% dari rencana 2,77% (Kinerja 586,87%).



2. Permasalahan

Tidak ada permasalahan pada paket ini karena mendapatkan penilaian kinerja AA/Sangat Memuaskan.

3. Rencana Tindak Lanjut

Karena mendapatkan penilaian kinerja AA/Sangat Memuaskan sehingga tidak membutuhkan Rencana Tindak Lanjut.

2.3.3 Paket EBA 994 Layanan Perkantoran

1. Progress dan Foto/Dokumentasi

Pada bulan Januari 2026 progress yang dicapai Paket EBA 994 Layanan Perkantoran adalah 0,00% dari rencana 0,18% (Kinerja 0,00%).



2. Permasalahan

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Januari namun realisasi pelaporan keuangan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Februari.

3. Rencana Tindak Lanjut

Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan.

2.4 Progres Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA. 2025

Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga. Mendukung tujuan penyelenggaraan evaluasi SAKIP pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*).

Pada bulan Januari 2026, progress rencana tindak lanjut evaluasi SAKIP TA 2025 adalah *input* data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada Web E-Sakip V3, terlihat pada **Gambar 2.1**.

Gambar 2.1 Progres Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi Pemerintah Jawaban	Nilai	Langkah Kerja	Daftar Evidence	Kriteria Penilaian			Catatan Hasil Evaluasi	Tenggapan Evaluasi
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		25,2			Terpenuhi dan sesuai kebijakan nasional	Terpenuhi dan telah dipertahankan dalam pelaksanaannya 1 tahun terakhir	Terpenuhi dan telah dipertahankan dalam pelaksanaannya 1 tahun terakhir		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AK	6			Terpenuhi dan sesuai kebijakan nasional	Terpenuhi dan telah dipertahankan dalam pelaksanaannya 1 tahun terakhir	Terpenuhi dan telah dipertahankan dalam pelaksanaannya 1 tahun terakhir		
Kriteria:											
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				Cek apakah telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	Bukti Minimal: 1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR; 2. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksanaan Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian PUPR	Ada/Tidak ada	Hasil Nilai Penemuan	Ya	Ya	Ya
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				Cek apakah telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	Bukti Minimal: 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025); 2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Budaya Kinerja Kementerian PUPR (10 tahun); 3. Tambahan Peraturan terkait pada masing-masing Unit Organisasi yang di revisi (jika ada), misalnya:	Ada	1,00	Ya	Ya	Ya

BAB III PENUTUP

3.1 Tindak Lanjut Kendala Terhadap Capaian Realisasi Anggaran Bulan Desember 2025

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Kendala di Bulan Sebelumnya

No	Output	Kendala Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan
1.	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Tidak terdapat kendala.	Mempertahankan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja dan jadwal.	Seluruh kegiatan telah terlaksana dengan capaian realisasi anggaran yang memperoleh interpretasi Sangat Memuaskan.
2.	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan	Tidak terdapat kendala.	Mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Kegiatan terlaksana sesuai target dengan hasil Sangat Memuaskan.
3.	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan	Tidak terdapat kendala.	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.	Kegiatan berjalan sesuai rencana dan memperoleh
4.	Advis dan Layanan Teknis Jembatan	Tidak terdapat kendala.	Mempertahankan kinerja pelaksanaan kegiatan.	Kegiatan terlaksana sesuai target.
5.	Layanan Perkantoran	Tidak terdapat kendala.	Mempertahankan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
6.	Uang Makan dan Lembur PNS dan PPPK	Tidak terdapat kendala.	Memastikan pembayaran sesuai ketentuan.	Realisasi telah dilaksanakan sesuai jadwal.
7.	Gaji Non PNS	Tidak terdapat kendala.	Memastikan pembayaran tepat waktu.	Pembayaran telah direalisasikan sesuai ketentuan.
8.	Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya	Tidak terdapat kendala.	Mempertahankan kelancaran operasional.	Kegiatan berjalan sesuai rencana.
9.	Pengadaan Meubelair	Tidak terdapat kendala.	Menyelesaikan seluruh proses pengadaan sesuai jadwal.	Pengadaan telah dilaksanakan dengan baik.
10.	Operasional Perkantoran	Tidak terdapat kendala.	Menjaga kelancaran operasional kantor.	Kegiatan terlaksana sesuai rencana.
11.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tidak terdapat kendala.	Melaksanakan pemeliharaan secara berkala.	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai jadwal.

3.2 Kendala dan Permasalahan Bulan Januari 2026

1. Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

Interpretasi : Cukup

Kendala

Terdapat kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada Bulan Januari 2026, namun realisasi pelaporan keuangan baru dapat diproses pada Bulan Februari 2026 sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran pada bulan pelaporan.

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan percepatan penyelesaian administrasi dan pelaporan keuangan.
- Meningkatkan koordinasi antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan agar penyampaian dokumen lebih tepat waktu.

2. Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Interpretasi : Cukup

Kendala

Realisasi pelaporan keuangan atas beberapa kegiatan masih dilakukan pada Bulan Februari 2026 meskipun kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Bulan Januari.

Rencana Tindak Lanjut

- Mempercepat penyampaian dokumen pertanggungjawaban.
- Melakukan monitoring berkala terhadap progres pelaporan kegiatan.

3. Layanan Perkantoran

Interpretasi : Sangat Kurang

Kendala

Realisasi anggaran masih rendah karena sebagian kegiatan telah dilaksanakan namun belum dapat dibukukan pada Bulan Januari 2026.

Rencana Tindak Lanjut

- Mempercepat proses administrasi dan pelaporan keuangan.
- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pengelola keuangan.

4. Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan

Interpretasi : Sangat Kurang

Kendala

Pelaporan keuangan atas kegiatan yang telah dilaksanakan masih dilakukan pada Bulan Februari 2026 sehingga realisasi anggaran Bulan Januari belum optimal.

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan percepatan penyelesaian dokumen administrasi.
- Melakukan monitoring terhadap penyelesaian laporan keuangan.

5. Pengelolaan Kepegawaian

Interpretasi : Sangat Kurang

Kendala

Sebagian kegiatan administrasi kepegawaian belum seluruhnya direalisasikan dalam pelaporan keuangan Bulan Januari.

Rencana Tindak Lanjut

- Mempercepat penyelesaian administrasi.
- Mengoptimalkan koordinasi antara unit kepegawaian dan pengelola keuangan.

6. Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Risiko dan SMAP

Interpretasi : Sangat Kurang

Kendala

Pelaporan keuangan atas kegiatan yang telah dilaksanakan masih dilakukan pada Bulan Februari sehingga realisasi Bulan Januari belum mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.

Rencana Tindak Lanjut

- Mempercepat proses pelaporan keuangan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres pelaporan.

3.3 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dalam melaksanakan pekerjaan pada Bulan Januari 2026 didukung oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang disusun secara terarah dan didukung dengan perencanaan anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target.
2. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam melakukan pengendalian, pengambilan keputusan, serta penyelesaian berbagai permasalahan secara cepat dan tepat.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
4. Koordinasi yang baik antarunit kerja dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.
5. Komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai perencanaan serta mendukung percepatan penyelesaian administrasi dan pelaporan keuangan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARMEN ADEKRISTI
Jabatan : KEPALA SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ROY RIZALI ANWAR
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ROY RIZALI ANWAR

JAKARTA, 30 JANUARI 2026
PIHAK PERTAMA
ARMEN ADEKRISTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan	IKP : Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	
	IKK : Tingkat kinerja pelayanan ke teknikan bidang jalan dan jembatan	100.00 %
	Rincian Output	
ABF.001 Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan		1.00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)	
Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis	IKK : Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87.05 %
	Rincian Output	
EBA.962 Layanan Umum		1.00 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran		1.00 Layanan

Kegiatan:

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran:

Anggaran:

Rp. 5,690,182,000
Rp. 2,749,459,000
Rp. 8,439,641,000

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ROY RIZALI ANWAR

JAKARTA, 30 JANUARI 2026
KEPALA SATKER BALAI
KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
ARMEN ADEKRISTI

Rincian Output, Hal. 1 dari 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						8,439,641	Total Anggaran
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan						5,690,182	
Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan						5,690,182	
	ABF.001.Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan				5,690,182	
			404	Advis dan Layanan Teknis		2,305,583	
		1.00 Laporan		AA PEMANTAUAN DAN EVALUASI JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	1,821,054	
		1.00 Laporan		AB ADVIS DAN LAYANAN TEKNIS JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	484,529	
			405	Layanan Data Dan Informasi		3,384,599	
		1.00 Laporan		AA DUKUNGAN TEKNIS KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	3,384,599	

Lampiran Catatan Kaki: Hal. 1 dari 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						2,749,459	
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)						2,749,459	
	EBA.962.Layanan Umum	1.00 Layanan				123,958	
			235	Penyusunan Laporan Keuangan Bmn		123,958	
				AD ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER BALAI JEMBATAN	KOTA BANDUNG	54,403	
				AE PENGELOLAAN KEPENGAWAJAN	KOTA BANDUNG	3,811	
				AF PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MANAJEMEN RESIKO DAN SMAP	KOTA BANDUNG	65,744	
	EBA.994.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				2,825,501	
			001	Gaji dan Tunjangan		330,060	
				AG UANG MAKAN DAN LEMBUR PNS DAN PPPK	KOTA BANDUNG	330,060	
			002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2,295,441	
				AH OPERASIONAL PERKANTORAN	KOTA BANDUNG	268,060	
				AI LANGGANAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL LAINNYA	KOTA BANDUNG	1,557,680	
				AJ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	KOTA BANDUNG	468,701	

Lampiran Catatan Kaki: Hal. 2 dari 2

MANUAL INDIKATOR KINERJA BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja	
1	148.GA - PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS 7698 - Kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan SK 02.04.01 Meningkatkan Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	IKK 03	Tingkat kinerja pelayanan keteknisan bidang jalan dan jembatan	$TSRBF_c = \left(\frac{RSBF_c \times 100\% + LTAF_c \times 100\%}{2} \right)$ Keterangan: TSRBF_c = Tingkat kinerja pelayanan keteknisan jalan dan jembatan (%) RSBF_c = Realisasi kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang dilaksanakan (dokumen) RSTT = Target kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang direncanakan (dokumen) LTAF_c = Realisasi tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitas pengujian dan servis teknis (nilai) LTFT = Target tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitas pengujian dan servis teknis (nilai) Khusus Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tidak melaksanakan pengembangan teknologi, sehingga hanya diukur dari tingkat kepuasan layanan
2	148.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 7756 - Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga SK 06.01.01 Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Didang Jalan dan Jembatan	1. Tingkat Efektivitas Pengolahan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Dialekskusi Tepat Waktu (50%)

Direktur Jenderal Bina Marga

Jakarta, 30 Januari 2026
Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Roy Rizali Anwar

Armen Adekristi

2. Surat/Nota Dinas Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA 2025

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS Jl. A.H. Nasution No. 264 Bandung 40264, Surel: bk@kpu.go.id																											
NOTA DINAS NOMOR KU0601/T/BKJTK/2026/88.2																											
Yth.	: Plt. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																										
Dari	: Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus																										
Hal	: Penyampaian Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun Anggaran 2025																										
Tanggal	: 22 Mei 2026																										
Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nomor PR0304/B/Bp/2026/185 tanggal 23 April 2026 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun Anggaran 2025 dan Nomor PR 0304/B/Bp/2026/336 tanggal 22 Mei 2026 hal Tindak Lanjut atas Penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Unit Kerja/UPT dan Satuan Kerja Unit Kerja/UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut 1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi AKIP Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan Memuaskan (A) dalam pengertian bahwa terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level Eselon IV/Pengawas, dengan pencapaian nilai 87,00%, dengan rincian komponen dan bobot berikut <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMPONEN</th> <th>BOBOT / NILAI MAKSIMAL (%)</th> <th>NILAI HASIL EVALUASI TA 2025 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> <td>25,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> <td>26,70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>13,35</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25</td> <td>21,75</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>100</td> <td>87,00</td> </tr> </tbody> </table> 2. Dari hasil...				NO	KOMPONEN	BOBOT / NILAI MAKSIMAL (%)	NILAI HASIL EVALUASI TA 2025 (%)	1	Perencanaan Kinerja	30	25,20	2	Pengukuran Kinerja	30	26,70	3	Pelaporan Kinerja	15	13,35	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75	Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	87,00
NO	KOMPONEN	BOBOT / NILAI MAKSIMAL (%)	NILAI HASIL EVALUASI TA 2025 (%)																								
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20																								
2	Pengukuran Kinerja	30	26,70																								
3	Pelaporan Kinerja	15	13,35																								
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75																								
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	87,00																								

3. Dari hasil penilaian diatas, terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
A. Perencanaan Kinerja	Menginventarisir bukti dukung perencanaan kinerja berupa berita acara, lembar asistensi, serta dokumen persuratan anggaran yang telah disusun.
B. Pengukuran Kinerja	Menginventarisir bukti dukung pengukuran kinerja berupa undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi rapat terkait pembahasan capaian kinerja yang telah disusun.
C. Pelaporan Kinerja	Menganalisis peningkatan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Menjaga konsistensi peningkatan kinerja setiap tahunnya; 2. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

4. Adapun rencana tindak lanjut dan waktu penyelesaian tindak lanjut atas hasil evaluasi Implementasi AKIP Tahun Anggaran 2025 pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (*terlampir*).

5. Selanjutnya, tindak lanjut tersebut akan dipantau dan dilaporkan dalam laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan Tahun Anggaran 2026.

Atas perhatian Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus


Arman Adekristi

Tembusan:
Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

Lampiran Nota Dinas Kepala Balai Keamanan
Jembatan dan Terowongan Khusus
Nomor : **KU 0601 / T / Bkjt / 2026 / 88.2**
Tanggal : 22 Mei 2026

Jadwal Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi AKIP TA 2025

No	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2025	Rencana Tindak Lanjut	Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026																																															
			Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt				Nov				Des											
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
1	Menginventarisir bukti dukung perencanaan kinerja berupa berita acara, lembar asistensi, serta dokumen persuratan anggaran yang telah disusun	Akan kami inventarisir bukti dukung perencanaan kinerja berupa berita acara, lembar asistensi, serta dokumen persuratan anggaran yang telah disusun																																																
2	Menginventarisir bukti dukung pengukuran kinerja berupa undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi rapat terkait pembahasan capaian kinerja yang telah disusun	Akan kami inventarisir bukti dukung pengukuran kinerja berupa undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi rapat terkait pembahasan capaian kinerja yang telah disusun																																																

No	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2025	Rencana Tindak Lanjut	Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026																																															
			Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt				Nov				Des											
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
3	Menganalisis peningkatan/ penurunan capaian dari tahun sebelumnya	Akan kami analisis peningkatan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya																																																
4	1. Menjaga konsistensi peningkatan kinerja setiap tahunnya 2. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya	Akan kami jaga konsistensi peningkatan kinerja setiap tahunnya dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya																																																

Kepala Balai
Kearifan, Jember dan Terowongan Khusus



Ben Adekristi

3. Lembar Kendali Matriks Kesesuaian Outline dan Muatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan

Matriks Kesesuaian dan Muatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan

No	Outline	Muatan	Kesesuaian Outline	Kesesuaian Muatan	Keterangan	Status Tanggal	Paraf
1	Pendahuluan						
1.1	Latar Belakang	Pada subbab ini diuraikan esensi penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan	✓	✓			
1.2	Tugas dan Fungsi	Pada subbab ini diuraikan history suatu instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan	✓	✓			
		Tugas	✓	✓			
		Fungsi	✓	✓			
1.3	Struktur Organisasi	Subbab ini diisi dengan bagan struktur organisasi mengacu pada peraturan	✓	✓			

No	Outline	Muatan	Kesesuaian Outline	Kesesuaian Muatan	Keterangan	Status Tanggal	Paraf
		perundang-undangan yang berlaku. Disajikan dalam bentuk grafis.					
2	Capaian Kinerja Bulanan						
2.1	Target Kinerja Bulan ke 1	Ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada bulan tersebut	✓	✓			
2.2	Capaian Target Bulanan	Pada bab ini diuraikan capaian kinerja bulanan dibandingkan dengan targetnya	✓	✓			
2.3	Uraian Singkat Paket Pekerjaan	Berisi uraian paket-paket pekerjaan mulai dari penjelasan paket, progres/capaian, permasalahan/kendala, rencana tindak lanjut serta foto-foto terupdate	✓	✓			
2.4	Progres TL LHE SAKIP TA 2025	Menampilkan progres tindak lanjut evaluasi SAKIP pada triwulan terkait dilengkapi dengan bukti dukung berupa dokumentasi/link bukti dukung	✓	✓			

No	Outline	Muatan	Kesesuaian Outline	Kesesuaian Muatan	Keterangan	Status Tanggal	Paraf
3	Penutup						
3.1	TL Kendala Bulan Sebelumnya	Berisikan progress tindak lanjut per output/ per paket dari permasalahan yang terjadi di bulan sebelumnya	✓	✓			
3.2	Kendala dan Permasalahan Bulan Januari	Berisikan kendala/ permasalahan per output pada bulan ke 1	✓	✓			
3.3	Faktor Pendukung Keberhasilan	Berisikan faktor pendukung yang dimiliki sehingga mendorong keberhasilan capaian	✓	✓			

Bandung, 03 Februari 2026

Kepala Balai Keamanan Jembatan
dan Terowongan Khusus



Armen Adekristi